SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BERNAYAU KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

Oleh:

YUSTA MAISA SHELLA

NIM. E1031211084

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BERNAYAU KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Yusta Maisa Shella

NIM. E1031211084

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BERNAYAU KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

Oleh:

YUSTA MAISA SHELLA
NIM. E1031211084

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Bima Sujendra, S.IP.,M.Si : 6/05/2025
NIP. 198805072014041002

Dosen Pembimbing Pendamping

Herri Junius Nge, S.Sos.,M.Si : 7/04/2025
NIP. 198506092015041002

SKRIPSI
HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BERNAYAU KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

Oleh:

YUSTA MAISA SHELLA
NIM. E1031211084

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Kamis, 12 Juni 2025
Waktu	: 10.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Sidang FISIP Untan

Ketua	Sekretaris
Bima Sujendra, S.I.P.,M.Si	**Herri Junius Nge, S.Sos.,M.Si**
NIP. 198805072014041002	**NIP. 198506092015041002**

Penguji Pertama	Penguji Kedua
Martinus, S.Sos., M.Si	**Haunan Fachry Rohilie, S.I.P., M.A**
NIP. 197212272006041002	**NIP. 199003182019031010**

Disahkan Oleh:

Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bernayau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini fokus pada tiga indikator koordinasi berdasarkan Teori W. Richard Scott: komunikasi, pembagian tugas, dan mekanisme penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara kedua lembaga masih belum optimal. Komunikasi formal belum terstruktur dengan baik, pembagian peran belum dipahami secara merata, dan belum ada mekanisme formal untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Faktor pendukung koordinasi meliputi hubungan personal yang baik antara pimpinan, dukungan masyarakat, dan kesamaan visi pembangunan. Sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur pendukung yang terbatas, perbedaan jadwal dan kesibukan, serta kurangnya mekanisme koordinasi formal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme komunikasi formal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan mekanisme koordinasi formal, dan optimalisasi pelibatan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif.

Kata Kunci: Koordinasi, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tata Kelola Pemerintahan Desa, Komunikasi, Penyelesaian Konflik, Infrastruktur Desa.

ABSTRACT

This research analyzes the coordination between the Village Government and the Village Consultative Body (*Badan Permusyawaratan Desa*/BPD) in Bernayau Village, Sepauk Subdistrict, Sintang Regency. Using a qualitative approach, this study focuses on three coordination indicators based on W. Richard Scott's theory: communication, division of tasks, and conflict resolution mechanisms. The findings indicate that coordination between the two bodies is still not optimal. Formal communication is not well-structured, roles and responsibilities are not evenly understood, and there is no formal mechanism to resolve differences in opinion. Supporting factors include good personal relationships between leaders, community support, and a shared vision for development. However, hindering factors involve limited human resource capacity, restricted supporting infrastructure, differing schedules and workloads, and a lack of formal coordination mechanisms. This study recommends strengthening formal communication mechanisms, enhancing human resource capacity, developing formal coordination procedures, and optimizing community involvement to achieve more effective village governance.

Keywords: *Coordination, Village Government, Village Consultative Body, Governance, Communication, Conflict Resolution, Infrastructure*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bernayau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Koordinasi yang efektif antara kedua lembaga ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari identifikasi beberapa permasalahan koordinasi, seperti kurangnya pemahaman peran dan fungsi masing-masing lembaga, komunikasi yang tidak efektif, minimnya partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, serta kurangnya mekanisme koordinasi yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan Desa, Ketua dan Anggota BPD, serta masyarakat Desa Bernayau.

Analisis penelitian ini menggunakan Teori Koordinasi dalam Organisasi yang dikemukakan oleh W. Richard Scott, dengan tiga indikator utama: komunikasi, pembagian tugas, dan mekanisme penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD di Desa Bernayau belum terstruktur dengan baik. Rapat koordinasi yang dijadwalkan setiap tiga bulan sekali tidak selalu terlaksana, dan kualitas informasi yang

disampaikan belum optimal, terutama dalam hal pengelolaan anggaran desa yang mencapai Rp981.792.000 pada tahun anggaran 2024.

Dalam hal pembagian tugas, pemahaman terhadap peran masing-masing lembaga cukup baik di tingkat pimpinan, namun belum merata di tingkat staf dan anggota. BPD belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, sementara keterlibatan BPD dalam perencanaan pembangunan masih terbatas. Selain itu, belum terdapat mekanisme formal untuk penyelesaian konflik, sehingga perbedaan pendapat lebih banyak diselesaikan secara informal melalui pendekatan personal dan musyawarah terbatas.

Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi, baik pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung meliputi hubungan personal yang baik antara pimpinan kedua lembaga, dukungan masyarakat, dan kesamaan visi pembangunan. Sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur pendukung yang terbatas, jadwal dan kesibukan masing-masing pihak, serta kurangnya mekanisme koordinasi formal.

Untuk mengilustrasikan dinamika koordinasi secara konkret, penelitian ini menyajikan tiga studi kasus spesifik: penanganan jembatan gantung pasca banjir bandang September 2022, pemenuhan kebutuhan Poskesdes, dan advokasi perbaikan infrastruktur jembatan di Sintang. Analisis terhadap studi kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara aturan dan praktik koordinasi dalam penanganan infrastruktur desa. Salah satu keberhasilan koordinasi ditunjukkan oleh BUMDes Kelang Ruwe yang berhasil meraih juara tiga

BUMDes terbaik se-Kabupaten Sintang, yang menjadi contoh nyata bagaimana koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat dapat menghasilkan capaian positif bagi desa.

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD di Desa Bernayau, meliputi penguatan mekanisme komunikasi formal melalui pertemuan reguler dengan agenda yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis, pengembangan mekanisme koordinasi formal termasuk SOP dan instrumen pengawasan, optimalisasi pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta rekomendasi spesifik untuk penanganan infrastruktur seperti pembentukan forum koordinasi infrastruktur desa dan pengembangan SOP tanggap bencana untuk menghadapi situasi darurat di masa depan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : YUSTA MAISA SHELLA

Nomor Mahasiswa : E1031211084

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak,6 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



YUSTA MAISA SHELLA

NIM. E1031211084

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Bahagia Itu Letaknya Diproses, Bukan Di Hasilnya "

(Theo Derick)

Skripsi ini di persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nafas kehidupan, keselamatan, kesehatan, dan selalu menyertai serta memberkati selama menjalani masa perkuliahan.
2. Orang tua tercinta, Bapak saya Firminus Apen dan mama saya Fransiska Lusiana yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan sepenuh cinta hingga dapat sampai pada titik ini. Terimakasih atas segala doa dan cinta kasih hal-hal baik dalam bentuk apapun itu yang sangat berharga bagi saya yang diberikan kepada saya selama saya hidup, terlebih saat saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Semoga hal baik yang kalian berikan mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
3. Kakak saya tersayang, Yuliana Corlina yang telah memberikan saran dan motivasi terbaik mulai dari saya bersekolah hingga jenjang perkuliahan serta menjadi panutan terbaik hingga saat ini.
4. Kepada teman-temanku yang sudah ku anggap sebagai keluarga yang sangat berjasa memberikan motivasi, dukungan, bantuan yaitu Irena Meisi Helti Indriani Dan Puspita Natalisa. Selalu menemani saya dalam susah maupun senang.

5. Kepada kekasih saya Dionisius yang setia menemani semasa kuliah dari awal sampai titik ini dan selalu memberikan semangat di saat saya down
6. Serta teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Reguler A Angkatan 2021.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bernayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang." Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akademik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberikan arahan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Dr. Ira Patriani, M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, yang selalu mendukung kegiatan akademik mahasiswa.
3. Bima Sujendra, S.IP., M.Si, Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan panduan akademik selama penulis menempuh studi.
4. Bima Sujendra, S.IP., M.Si, Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan berharga dalam penyusunan proposal ini.

5. Herri Junius, Nge, S.sos., M.Si, Pembimbing Pendamping, yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses penyusunan proposal ini.

Semua pihak, baik dosen, staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta teman-teman mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral maupun material.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian ini. Semoga proposal ini dapat bermanfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pontianak, Mei 2025

Penulis

Yusta Maisa Shella
NIM. E1031211084

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

RINGKASAN SKRIPSI vi

PERNYATAAN KEASLIAN viii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN x

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR GAMBAR xx

DAFTAR LAMPIRAN xxi

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 5

1.3. Fokus Penelitian 6

1.4. Rumusan Masalah 6

1.5. Tujuan Penelitian 7

1.6. Manfaat Penelitian 7

1.6.1. Manfaat Teoritis 7

1.6.2. Manfaat Praktis 7

BAB II 9

TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1. Teori Koordinasi 9
2.2. Tata Kelola Pemerintahan Desa 12
2.2.1. Koordinasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa 16
2.2.2. Tantangan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa 17
2.3. Hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 18
2.3.1. Peran Pemerintah Desa dan BPD dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa 18
2.3.2. Prinsip Koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD 19
2.3.3. Fungsi Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat dalam Hubungan Pemerintah Desa dan BPD 20
2.3.4. Tantangan dalam Hubungan Pemerintah Desa dan BPD 21
2.4. Applied Theori 23
2.5. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 24
2.6. Alur Pikir Penelitian 26
2.7. Pertanyaan Penelitian 30
BAB III 31
METODE PENELITIAN 31
3.1. Jenis Penelitian 31
3.1.1. Langkah-langkah Penelitian 32
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 34
3.2.1. Lokasi Penelitian 34

3.2.2. Waktu Penelitian 34
3.3. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 35
3.3.1. Subjek Penelitian 35
3.3.2. Objek Penelitian..... 35
3.3.3. Instrumen Penelitian atau Alat Pengumpulan Data 35
3.4. Teknik Pengumpulan Data..... 36
3.5. Analisis Data..... 37
3.5.1. Keabsahan Data 37
3.5.2. Teknik Analis Data..... 38
BAB IV 40
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 40
4.1. Gambaran Umum Desa Bernayau 40
4.2. Keadaan Demografis 40
4.3. Potensi Ekonomi..... 40
4.4. Kondisi Sosial dan Budaya..... 41
4.5. Struktur Pemerintahan 41
4.6. Anggaran Desa 42
4.7. Sarana dan Prasarana..... 42
4.8 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa 43
4.9 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)..... 47
4.10 Koordinasi Kepala Desa Dengan BPD..... 50
BAB V..... 53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

5.1. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bernayau 53
5.1.1. Komunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD 53
5.1.2. Pembagian Tugas antara Pemerintah Desa dan BPD 55
5.1.3. Mekanisme Penyelesaian Konflik 58
5.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Koordinasi Pemerintah Desa dengan BPD 60
5.2.1. Faktor Pendukung 60
5.2.2. Faktor Penghambat 61
5.3. Pembahasan 64
5.3.1. Komunikasi dalam Perspektif Teori Koordinasi 64
5.3.2. Pembagian Tugas dalam Perspektif Teori Koordinasi 65
5.3.3. Mekanisme Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Teori Koordinasi 66
5.3.4. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perspektif Teori Koordinasi 67
5.4. Rekomendasi untuk Meningkatkan Koordinasi 68
5.4.1. Penguatan Mekanisme Komunikasi Formal 68
5.4.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 69
5.4.3. Pengembangan Mekanisme Koordinasi Formal 69
5.4.4. Optimalisasi Pelibatan Masyarakat 70
5.5. Studi Kasus Spesifik: Koordinasi dalam Penanganan Infrastruktur dan Fasilitas Umum di Desa Bernayau 70
5.5.1. Studi Kasus 1: Penanganan Jembatan Gantung Pasca Banjir Bandang 70

5.5.2. Studi Kasus 2: Pemenuhan Kebutuhan Poskesdes 73
5.5.3. Studi Kasus 3: Advokasi Perbaikan Infrastruktur Jembatan di Sintang 75
5.6. Analisis Gap Antara Aturan dan Praktik Koordinasi dalam Penanganan Infrastruktur Desa 78
5.6.1. Gap dalam Pelaksanaan Fungsi BPD terkait Penanganan Infrastruktur 78
5.6.2. Gap dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa terkait Koordinasi dengan BPD dalam Penanganan Infrastruktur 79
5.6.3. Gap dalam Mekanisme Koordinasi Penanganan Bencana 80
5.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Koordinasi dalam Penanganan Infrastruktur 81
5.7.1. Faktor Pendukung 81
5.7.2. Faktor Penghambat 82
5.8. Rekomendasi untuk Meningkatkan Koordinasi dalam Penanganan Infrastruktur 84
5.8.1. Pembentukan Forum Koordinasi Infrastruktur Desa 84
5.8.2. Pengembangan SOP Tanggap Bencana 84
5.8.3. Peningkatan Kapasitas Teknis 84
5.8.4. Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Infrastruktur 85
5.8.5. Penguatan Mekanisme Partisipasi Masyarakat 85
BAB VI 86
PENUTUP 86

6.1. Kesimpulan 86
6.1.1 Aspek Komunikasi dalam Koordinasi 86
6.1.2. Aspek Pembagian Tugas dalam Koordinasi 87
6.1.3. Aspek Mekanisme Penyelesaian Konflik dalam Koordinasi 88
6.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Koordinasi 88
6.1.5. Kesimpulan Umum 89
6.2. Saran 90
6.2.1. Saran untuk Pemerintah Desa Bernayau 90
6.2.2. Saran untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bernayau 91
6.2.3. Saran untuk Pemerintah Desa dan BPD Bernayau 92
6.2.4. Saran untuk Pemerintah Kabupaten Sintang 92
6.2.5. Saran untuk Penelitian Selanjutnya 93
DAFTAR PUSTAKA 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir 29

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA 97

LAMPIRAN 2 LOKASI PENELITIAN 100

LAMPIRAN 3 DAFTAR NAMA SUBJEK PENELITIAN 101

LAMPIRAN 4 BIODATA PENULIS 102

LAMPIRAN 5 SURAT TUGAS PENELITIAN 103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki peran strategis sebagai mitra Pemerintah Desa. Fungsi utamanya meliputi penyusunan peraturan desa, penyaluran aspirasi masyarakat, hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan desa. Kerja sama yang harmonis antara kedua lembaga ini diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, serta keberlanjutan. Namun, dalam implementasinya, koordinasi antara kedua lembaga tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pembangunan desa secara keseluruhan.

Desa Bernayau, yang terletak di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam pembangunan. Desa ini dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian dan kehutanan, serta sumber daya manusia dengan budaya gotong royong yang kuat. Potensi ini dapat menjadi modal besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, seperti halnya banyak desa lain di Indonesia, Desa Bernayau juga menghadapi

berbagai tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD.

Koordinasi yang kurang optimal dapat dilihat dari beberapa permasalahan, seperti kurangnya sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan desa, keterlambatan dalam pengambilan keputusan penting, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam berbagai forum musyawarah desa. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atau tidak mampu menjawab permasalahan yang dihadapi desa. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang kurang matang justru menimbulkan polemik di tingkat masyarakat dan memperburuk hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD.

Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai peran dan fungsi masing-masing lembaga. Pemerintah Desa sering kali mendominasi pengambilan keputusan tanpa melibatkan BPD secara maksimal, sementara BPD sendiri kadang kurang aktif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Kedua, adanya komunikasi yang tidak efektif antara kedua pihak. Komunikasi yang kurang lancar dapat memunculkan salah pengertian, kecurigaan, atau bahkan konflik internal yang menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ketiga, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi Pemerintah Desa maupun BPD, yang mengakibatkan kurangnya inisiatif atau inovasi dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Di sisi lain, koordinasi yang baik memiliki dampak positif yang sangat signifikan terhadap pembangunan desa. Dengan adanya komunikasi yang efektif, kesepahaman dalam pembagian peran, dan kerja sama yang solid, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Pemerintah Desa dapat lebih fokus pada pelaksanaan teknis program-program pembangunan, sementara BPD dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat secara optimal. Masyarakat juga akan merasa lebih dilibatkan dalam proses pembangunan, sehingga dapat meningkatkan rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap berbagai program yang dijalankan di desa.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh sejauh mana koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD berjalan dengan baik. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di beberapa desa menunjukkan bahwa desa-desa dengan tingkat koordinasi yang tinggi antara Pemerintah Desa dan BPD mampu mencapai target pembangunan yang lebih baik, seperti peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, perbaikan infrastruktur, dan pengelolaan dana desa yang lebih transparan. Sebaliknya, desa-desa yang mengalami koordinasi yang buruk cenderung menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari konflik internal, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga kebijakan yang tidak sesuai kebutuhan.

Desa Bernayau, sebagai salah satu desa yang memiliki potensi besar, menjadi objek kajian yang menarik untuk diteliti dalam konteks pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD. Analisis mendalam terhadap

koordinasi ini akan memberikan gambaran mengenai tantangan utama yang dihadapi, faktor-faktor yang mendukung atau menghambat koordinasi, serta langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hubungan kerja sama antara kedua lembaga tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi inovasi atau pendekatan baru dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

Dalam konteks akademis, penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek hubungan kelembagaan antara Pemerintah Desa dan BPD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang tata kelola desa di Indonesia serta memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika koordinasi antar-lembaga di tingkat lokal. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Desa dan BPD di Desa Bernayau dalam memperbaiki mekanisme koordinasi mereka. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten atau pihak terkait lainnya untuk merumuskan kebijakan atau program yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD di Desa Bernayau, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu kedua lembaga tersebut dalam membangun kerja sama yang lebih harmonis dan produktif. Pada akhirnya, perbaikan koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong terciptanya tata kelola

pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan inklusif di Desa Bernayau, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa masalah utama yang dapat diidentifikasi terkait pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bernayau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

1. Kurangnya Pemahaman Peran dan Fungsi

   Pemerintah Desa dan BPD sering kali memiliki pemahaman yang berbeda tentang peran dan fungsi masing-masing lembaga. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas atau bahkan konflik dalam pelaksanaan kebijakan desa. Ketidakjelasan ini sering menjadi kendala utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif.

2. Komunikasi yang Tidak Efektif

   Komunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD belum berjalan secara optimal. Kurangnya forum komunikasi yang terjadwal dan terstruktur, serta tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang jelas, sering menghambat proses pengambilan keputusan.

3. Minimnya Partisipasi dalam Perencanaan dan Pengawasan

   Dalam banyak kasus, pelibatan BPD dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan desa masih terbatas. Padahal, salah satu fungsi utama BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi

pelaksanaan program pembangunan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kedua lembaga tersebut.

4. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Terbatas

   Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat Pemerintah Desa maupun BPD, turut memengaruhi efektivitas koordinasi. Keterampilan dalam manajemen, administrasi, serta kemampuan memahami regulasi sering kali belum memadai, sehingga memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan desa.

5. Kurangnya Mekanisme Koordinasi yang Jelas

   Desa Bernayau belum memiliki mekanisme koordinasi yang terstruktur antara Pemerintah Desa dan BPD. Ketidakadaan pedoman atau prosedur tetap dalam pelaksanaan koordinasi menyebabkan berbagai inisiatif sering bersifat ad-hoc dan tidak berkesinambungan.

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bernayau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, dengan menyoroti sejauh mana koordinasi tersebut berjalan efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bernayau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang efektif?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bernayau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.
2. Mengidentifikasi sejauh mana koordinasi tersebut mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif.
3. Menggali faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek koordinasi antara lembaga pemerintahan di tingkat desa. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tema serupa.

1.6.2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Desa dan BPD

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD di Desa Bernayau. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif untuk

memperbaiki mekanisme koordinasi serta mendorong terciptanya kerja sama yang lebih efektif.

b) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar dalam merumuskan kebijakan atau program yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa di wilayahnya.

c) Bagi Masyarakat Desa Bernayau

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa dan BPD, sehingga masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pembangunan desa secara kolektif.